

PARTISIPASI PEMUDA DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERDESAAN DI DESA BULUROTO KABUPATEN BLORA

Oleh :

Bayu Adhi Nugroho - 14010111130052

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In terms of rural development, community participation is essential to increase the community's life quality and welfare. Youth generation, as the agent of change, has major rule in the empowerment since they have pure motivation to develop their area. The Community Empowerment Program in Rural Areas (PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM-MD) had facilitated the development program in Buluroto Area from 2009 to 2014. From that background, this undergraduate thesis discussed the research question: "How the youth in Buluroto Village participated in the Community Empowerment Program in Rural Areas (PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM-MD)? and What were the obstacles faced by the youth during the implementation of the Community Empowerment Program in Rural Areas (PNPM Mandiri Perdesaan/PNPM-MD) in Buluroto Village?"

The research used descriptive-qualitative method using the samples obtained based on purposive sample method that was designed by the author and conducted by performing in-depth interview, observation, and documentation. The data were then analyzed by data reduction, data presentation, and making conclusion.

The result showed that the level of youth participation in planning process, implementation, monitoring and evaluation as well as implementation of the program was low, while the youth participated well enough in maintaining the outcome of the program. The obstacles during the planning process were less dissemination from the village administration and no youth organization. During the program implementation, the obstacle was that the program was done completely by contractors so that in monitoring and evaluating process, the youth had no chance to monitor and give input related to the problems occurred during the implementation. While in maintenance stage, the obstacles were less information related to SPP and strict selection from the village administration and the implementation team. The village administration is suggested to give

more information to the youth about the development of the area, while the youth is suggested to be more proactive and care about the development in Buluroto Village.

Key words: *Youth, participation, empowerment.*

PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan di desa, partisipasi merupakan suatu elemen yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menyukseskan program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pemuda di desa pada khususnya. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya (Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm: 82)

Partisipasi pemuda sangat penting dalam suatu masyarakat, khususnya dalam pembangunan bangsa mengingat pemuda merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Berhasil tidaknya suatu proses pembangunan suatu bangsa tergantung pada tingkat partisipasi pemuda yang ada pada suatu negara tersebut. Dalam era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan dan kompetisi merupakan suatu hal yang lumrah terjadi, pemuda dituntut untuk aktif, peduli, inovatif, dan bersemangat dalam upaya untuk meneruskan cita-cita pembangunan suatu bangsa dan negara.

Pemuda juga acap kali dianggap sebagai kelompok non partisan karena pemuda cenderung bersikap netral atau tidak memihak pada kepentingan terutama yang bersifat politis. Sehingga pemuda dalam upaya meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dan negara tidak lagi mengatasnamakan kepentingan

pribadi maupun kelompoknya. Namun idealisme dan kepedulianlah yang mengakibatkan pemuda menjadi bersemangat untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan bangsa. Tanpa adanya idealisme dan kepedulian dirasa mustahil bagi pemuda untuk mau dan mampu meneruskan cita-cita pembangunan bangsa. Pemuda dengan segala bentuk idealismenya merupakan kekuatan yang luar biasa untuk melakukan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa terkait mengenai pemerataan pembangunan di Indonesia, maka Pemerintah Pusat bersama dengan pemangku kebijakan yang lain mengeluarkan suatu program pemberdayaan masyarakat dengan mengadopsi prinsip partisipatif yang menitik beratkan pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali para generasi muda untuk ikut terlibat mulai dari proses penyerapan aspirasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan (*PTO PNPM Mandiri Perdesaan*)

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan di bidang infrastruktur desa melalui penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Dalam pengelolaan Program PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Tabel 1.1.
Realisasi Pembangunan Di Desa Buluroto Tahun 2009-2014

Tahun	Pemanfaatan	Jumlah
2009	1. SPP	43.157.000
	2. Drainase (533m)	107.420.000
	3. Talud Jalan (400m)	52.055.900
		202.633.800
2010	1. SPP	40.000.000
	2. Drainase (450m)	93.305.200
		133.305.200
2011	1. SPP	45.262.000
	2. TaLud Jalan (937m)	129.594.000
		174.856.000
2012	1. Talud Jalan (700m)	56.669.000
		56.669.000
2013	1. Talud Jalan (1.086m)	135.590.500
	2. Talud Jalan (242m)	30.884.500
	3. Pelatihan Ternak Kambing	24.960.000
		191. 435.000
2014	1. Sarana Air Bersih (1 unit)	88.243.000
	2. Talun Jalan dan Drainase (347m)	71.116.000
		159.359.000

Sumber. UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banjarejo

Dari data diatas maka bisa diketahui bahwa sejak tahun 2009 Program PNPM Mandiri Perdesaan ditetapkan hingga tahun 2014 di Kecamatan Banjarejo, Desa Buluroto selalu mendapatkan fasilitas dari Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka untuk pembangunan desa.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Bagaimana partisipasi pemuda dalam mensukseskan Program PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Buluroto ?” dan “Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemuda dalam melaksanakan Progam PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Buluroto?”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis partisipasi pemuda dalam menyukseskan program pembangunan di Desa Buluroto dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buluroto.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori partisipasi dan pemberdayaan terhadap pemuda desa. berdasarkan teori tersebut

penulis ingin mencoba mengidentifikasi keikutsertaan pemuda dalam menyukseskan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buluroto Kabupaten Blora.

Metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sampel dan data dilakukan secara purposive dan snowball. Penelitian akan dilakukan di Desa Buluroto Kabupaten Blora. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan merupakan suatu proses untuk mengikutsertakan seorang atau sekelompok pemuda untuk diikutsertakan dalam suatu proses perencanaan atau dalam proses untuk menentukan strategi dalam penyusunan kepanitiaan atau anggaran pada suatu kegiatan/proyek pembangunan. Dalam suatu kegiatan/proyek pembangunan, perencanaan merupakan salah satu proses yang sangat penting karena dalam proses perencanaan terdapat apa saja yang dibutuhkan dan akan menjadi acuan dari proses pembangunan, seperti bisa dilihat dari proses penjaring gagasan atau aspirasi, sampai dengan penentuan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, keikutsertaan pemuda sangat diharapkan dalam menciptakan inovasi-inovasi atau kreativitas mengenai perencanaan pembangunan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu sendiri merupakan suatu forum musyawarah tahunan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan pemangku kepentingan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa tak terkecuali partisipasi aktif seluruh pemuda dan kelompok perempuan serta Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa untuk mendiskusikan, membahas, dan menyepakati mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang akan direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Keikutsertaan pemuda di Desa Buluroto dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan keputusan mengenai prioritas pembangunan dalam forum

Musrenbangdes masih rendah. Pemuda cenderung tidak diikutsertakan dalam forum Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Mardi selaku Pendamping Lokal (Program) Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (*hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 pukul 09.30 wib*):

“Partisipasi pemuda sendiri masih rendah dalam proses perencanaan, hal tersebut bisa saja karena pihak desa sendiri tidak mengikutsertakan, karena dalam suatu rapat atau musyawarah sendiri hanya melibatkan Kades beserta para tokoh masyarakat yang memiliki satu pemikiran dengan Kades. Sedangkan pemuda jarang sekali yang ikut terlibat atau bisa dikatakan dukungan Kades terhadap pemuda sangat kurang.”

Dalam pernyataan Bapak Wardi maka bisa diketahui bahwa pemuda sengaja tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan dalam forum Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan Kades terhadap pemuda untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbangdes. Sebaliknya yang terjadi justru Pemerintah Desa hanya melibatkan para tokoh masyarakat utamanya yang memiliki satu pemikiran atau dalam arti yang sepihak dengan Kepala Desa.

Bapak Gregorius Munarwan selaku Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan juga mengungkapkan bahwa (*hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 pukul 13.30 wib*):

“...keterlibatan pemuda dalam proses penyampaian aspirasi dalam proses perencanaan hanya terlihat sebesar 10% saja. Karena pemuda di desa cenderung tidak aktif dan apa adanya dalam proses pembangunan dan dalam penentuan keputusan sebenarnya pemuda turut serta tetapi tidak memberikan pengaruh yang dominan dalam menentukan prioritas pembangunan.”

Dari pernyataan Bapak Gregorius Munarwan maka bisa diketahui bahwa keikutsertaan pemuda masih rendah baik dalam proses penyampaian aspirasi maupun dalam proses penentuan keputusan mengenai prioritas pembangunan.

2. Proses Pelaksanaan Pembangunan

Proses pelaksanaan pembangunan (implementasi) merupakan suatu proses untuk mengikutsertakan seluruh masyarakat khususnya para pemuda untuk melaksanakan suatu proyek atau program pembangunan baik dalam bentuk sumbangan pemikiran maupun tenaga untuk memanfaatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang difasilitasi oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana merupakan kelanjutan dari tahapan proses perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui forum Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Keikutsertaan pemuda Desa Buluroto dalam pelaksanaan kegiatan hanya terlihat ketika pemuda menjadi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan pada saat pembangunan tower air di Dusun Sambiroto saja. Tetapi secara keseluruhan partisipasi atau keikutsertaan pemuda masih rendah. Bapak Jojok Selaku Ketua Karang Taruna Desa Buluroto mengungkapkan bahwa (*hari Senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 08.00 wib*)

“...la sekarang ini, dalam rapat-rapat kepanitian saja tidak terlibat. Apalagi bisa terlibat dalam pembangunan fisiknya, ya jelas tidak mungkin lagi.”

Dari pernyataan Bapak Jojok bisa diketahui bahwa tingkat keikutsertaan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah karena pemuda merasa tidak diikutsertakan dalam rapat untuk membahas dan merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Buluroto. Senada dengan Bapak Jojok, Muhammad Irkham Sahidin selaku pemuda mengungkapkan bahwa (*hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 pukul 08.00 wib*):

“Keterlibatan pemuda ya tidak ada, karena program yang ada seperti apa saja tidak tahu. Rata-rata langsung diserahkan kepada pemborong dan pemuda tidak dilibatkan. Mungkin mereka berpikir kalau diserahkan kepada pemborong maka akan mendapatkan keuntungan dari pada jika dibentuk sistem gotong royong.”

Dari pernyataan Muhammad Irkham Sahidin diketahui bahwa pelaksanaan pembangunannya justru dilaksanakan oleh pemborong dan bukan partisipasi aktif pemuda Desa Buluroto secara langsung.

2.3. Proses Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Proses pemantauan dan evaluasi mengenai proyek atau program pembangunan sangat diperlukan, bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi juga untuk mendapatkan umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini keikutsertaan pemuda bisa dilihat dari keikutsertaan pemuda untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan keikutsertaan untuk ikut terlibat dalam mengumpulkan dan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perkembangan program pembangunan serta perilaku dari aparat pembangunan.

Dengan adanya pemantauan dari pemuda desa ini berarti sudah mencerminkan prinsip partisipatif yang selama ini diutamakan oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan dalam mengelola setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan pemantauan mengenai pelaksanaan pembangunan, keikutsertaan pemuda Desa Buluroto untuk ikut terlibat secara langsung masih rendah. Bapak Gregorius Munarwan selaku Fasilitator Teknis (FT) PNPM Mandiri Perdesaan (*hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 pukul 13.30 wib*) mengungkapkan bahwa:

“Keterlibatan pemuda masih kurang dalam memantau jalannya proses pembangunan, karena pemuda cenderung tidak diberikan ruang dan kesempatan dari Pemerintah Desa karena pemuda dianggap belum memiliki pemahaman serta kesadaran dari para pemuda yang masih kurang dalam setiap tahap pembangunan di desa akibat tidak adanya yang mengajak pemuda untuk ikut terlibat secara khusus.”

Dari pernyataan Bapak Gregorius Munarwan bisa diketahui bahwa keikutsertaan pemuda masih rendah akibat tidak adanya ruang bagi pemuda untuk ikut terlibat dalam proses pemantauan. Dengan tidak ikut terlibat dalam proses pemantauan maka informasi mengenai permasalahan selama proses pelaksanaan pembangunan juga tidak ada. Sebenarnya keikutsertaan pemuda dalam memantau jalannya pelaksanaan pembangunan ada, hal tersebut seperti

yang telah diungkapkan Muhammad Irkham Sahidin selaku Pemuda bahwa
(hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 pukul 08.00 wib):

“...pemantauan pribadi sebenarnya ada, tetapi pemantauan tersebut hanya sebatas diskusi kopi dalam arti hanya didiskusikan di warung kopi, karena kalau mau menyampaikan ke PNPM Mandiri Perdesaan tidak mungkin dan kalau diajukan kepada pemborong pasti mereka juga tidak akan menanggapi karena mereka hanya berpikir untuk mencari keuntungan atau anti kritik”

Dari pernyataan Muhammad Irkham Sahidin bisa diketahui bahwa keikutsertaan pemuda dalam memantau dan memberikan informasi tetap ada, tetapi hanya sebatas personal dan informasi yang dimiliki pemuda hanya sebatas diskusi kopi saja atau lebih tepatnya hanya dibicarakan di warung kopi dan bukan disampaikan langsung kepada pihak yang terkait terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Buluroto.

2.4. Proses Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pembangunan

Keikutsertaan pemuda pada tahap ini maksudnya yaitu pengikutsertaan seorang atau kelompok pemuda pada tahap pemanfaatan suatu proyek pembangunan setelah proyek pembangunan tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi atau keikutsertaan dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan, karena tujuan dari program pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup pemuda khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Keikutsertaan pemuda dalam pemanfaatan pembangunan fisik secara khusus belum ada, tetapi dalam pemanfaatan pembangunan non fisik sudah ada. Bapak Marjo selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program PNPM Mandiri Perdesaan (hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 pukul 14.00 wib) mengungkapkan bahwa:

“partisipasi dari kelompok perempuan terutama dalam pengembalian atau pembayaran angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam setiap tahunnya... ditingkat desa sendiri tingkat prosentase pengembalian atau pembayaran angsuran sebesar 97%, jika dibandingkan dengan desa lainnya Desa Buluroto sudah menduduki peringkat atas... karena jika tingkat prosentase pengembalian angsuran dibawah 80% maka tidak akan lolos dalam verifikasi untuk perguliran dana ditahun selanjutnya”.

Dari pernyataan Bapak Marjo maka bisa diketahui bahwa keikutsertaan pemuda dalam pengelolaan dana bergulir sudah ada khususnya untuk kelompok perempuan dan prosentase pengembalian atau pembayaran angsurannya sudah sangat baik yaitu mencapai 97%. Meskipun tingkat pengembalian atau pembayaran angsuran sudah sangat baik namun keikutsertaannya juga masih rendah. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Gregorius Munarwan selaku Faslitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan (hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 pukul 13.30 wib):

“pemuda khususnya kelompok perempuan sudah ikut berpartisipasi, karena sudah ada ketua dan wakil, tetapi tingkat partisipasinya masih rendah dan untuk tahun-tahun selanjutnya perlu untuk ditingkatkan”

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa keikutsertaan pemuda dalam pemanfaatan pembangunan non fisik masih rendah dan harus ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan untuk keikutsertaan pemuda dalam pemeliharaan aset pembangunan di Desa Buluroto pemuda sudah ikut terlibat dan ikut menjadi Tim Pemelihara Pembangunan yang dibentuk sebelum pelaksanaan pembangunan, tepatnya ketika program pembangunan sudah berjalan 80%. Bapak Marjo selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Mandiri Perdesaan (hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 pukul 14.00 wib) mengungkapkan bahwa:

”Mengenai pemeliharaan aset pembangunan, setiap program kegiatan pembangunan yang kita kerjakan itu sudah dibentuk Tim Pemelihara Pembangunan (TPP) dan setiap tahunnya sudah ada tim pemelihara yang sifatnya swadaya atau sukarela yang berasal dari masyarakat dan khususnya untuk pemuda. Mengapa bersifat swadaya ya karena tidak alokasi untuk membiayai tim pemeliharaan tersebut.”

Dari pernyataan Bapak Marjo tersebut maka bisa diketahui bahwa keikutsertaan pemuda desa untuk ikut memelihara aset pembangunan itu sudah ada. Dari Pemerintah Desa sendiri sebenarnya sudah membentuk Tim Pemelihara Pembangunan (TPP) yang berasal dari masyarakat khususnya pemuda yang dikelola secara swadaya atau sukarela. Tim Pemelihara tersebut

juga telah dibentuk struktur yang diantaranya terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, serta anggotanya bersal dari seluruh masyarakat khususnya pemuda. Dengan Kepala Desa yang bertugas sebagai pembina yaitu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang bertanggung jawab terhadap Tim Pemelihara. Tim pemelihara dibentuk dari masing-masing dusun yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, maksudnya jika salah satu dusun sedang melaksanakan program pembangunan maka di salah satu dusun itulah yang akan dibentuk Tim Pemelihara.

2.5 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pemuda Dalam Melaksanakan Program Pembangunan

Suatu proses pembangunan yang baik yaitu suatu proses pembangunan yang bersifat partisipatif yakni suatu proses pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi aktif seluruh pemuda secara langsung untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan. Untuk menciptakan suatu proses pembangunan yang partisipatif tidaklah mudah, sebab dalam setiap tahapan proses pembangunan yang meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pemantauan dan evaluasi serta proses pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan tidak akan terlepas dari suatu permasalahan atau hambatan. Utamanya dalam proses pembangunan yang difasilitasi oleh Program PNPM Mandiri perdesaan melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Meskipun dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan mengutamakan prinsip partisipatif dalam setiap tahapan pembangunannya namun hal tersebut tidak menjamin keikutsertaan pemuda untuk terlibat dalam tahapan pembangunannya mencapai 100%. Demikian juga dalam proses pembangunan di Desa Buluroto terutama yang difasilitasi oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Hambatan atau permasalahan tersebut menyangkut mengenai keikutsertaan pemuda Desa Buluroto dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pemantauan dan evaluasi, serta proses pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan.

2.5.1 Hambatan Dalam Proses Perencanaan

Adapun hambatan yang menyebabkan keikutsertaan pemuda Desa Buluroto dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah, yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada pemuda

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada pemuda desa menyebabkan pemuda tidak mengetahui informasi dan mekanisme proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui forum Musrenbangdes. Sehingga dengan kurangnya informasi mengenai akan diselenggarakannya rapat atau musyawarah bersama untuk membahas rencana pembangunan dalam forum Musrenbangdes menyebabkan pemuda merasa tidak diikutsertakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan terutama yang difasilitasi oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan.

- b. Tidak adanya wadah bagi pemuda

Tidak adanya wadah bagi pemuda yang bisa menampung dan mengembangkan seluruh pemikiran serta aktivitas kepemudaan seperti pada organisasi karang taruna di desa menyebabkan pemuda tidak diikutsertakan oleh Pemerintah Desa dalam forum Musrenbangdes, Pemerintah Desa hanya mengikutsertakan kelompok pemuda yang masih aktif saja.

2.5.2 Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan

Adapun hambatan yang menyebabkan keikutsertaan pemuda Desa Buluroto dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah yaitu:

- a. Pelaksanaan program pembangunan diserahkan kepada pemborong

Dengan diserahkannya proses pelaksanaan pembangunan kepada pihak pemborong menyebabkan para pemuda menjadi enggan untuk ikut terlibat terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang telah disepakati dalam forum Musrenbangdes. lagi pula, pemuda juga cenderung tidak mengetahui mengenai program pembangunan apa yang telah disepakati sebelumnya dalam

forum Musrenbang. Sehingga antusias dari pemuda sendiri sudah tidak ada untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

2.5.3 Hambatan Dalam Proses Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Adapun hambatan yang menyebabkan keikutsertaan pemuda Desa Buluroto dalam proses pemantauan dan evaluasi masih rendah yaitu:

- a. Tidak adanya ruang bagi pemuda untuk ikut memantau dan menyampaikan informasi mengenai permasalahan pelaksanaan pembangunan secara langsung

Tidak adanya ruang bagi yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pemuda menyebabkan pemuda tidak bisa ikut terlibat secara langsung untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan. Sehingga jika pemuda menemukan permasalahan mengenai pelaksanaan pembangunan mereka hanya cenderung membicarakan dan mendiskusikannya dengan pemuda yang lain di warung kopi.

2.5.3 Hambatan Dalam Proses Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pembangunan

Adapun hambatan yang menyebabkan keikutsertaan pemuda Desa Buluroto dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Masih belum optimalnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banjarejo mengenai Pengelolaan Dana Bergulir yang difasilitasi Program PNPM Mandiri Perdesaan melalui SPP terhadap kelompok perempuan di Desa Buluroto mengakibatkan tidak semua kelompok perempuan mengetahui mengenai cara dan tahapan untuk membentuk kelompok pengelolaan SPP yang baru.

- b. Adanya seleksi yang ketat dari Pemerintah Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tingkat kesadaran dari masing-masing individu sangatlah berbeda, utamanya dalam pengembalian atau pembayaran angsuran

SPP. Dalam pengembalian atau pembayaran angsuran SPP ada yang rajin dan ada juga yang menunggak pembayaran. Karena tingkat kesadaran masing-masing individu berbeda maka dilaksanakan seleksi ketat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama TPK kepada calon kelompok yang akan mengajukan SPP untuk memilih anggota kelompok yang memiliki kesadaran yang baik dalam pengembalian atau pembayaran angsuran SPP mengakibatkan banyak kelompok perempuan menjadi enggan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan SPP.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam menyukseskan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buluroto Kabupaten Blora maka bisa diketahui bahwa keikutsertaan pemuda dalam proses pembangunan masih rendah. Masih rendahnya keikutsertaan pemuda bisa dilihat dalam proses perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan pembangunan, proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta dalam proses pemanfaatan hasil pembangunan. Sebaliknya, keikutsertaan pemuda dalam proses pemeliharaan hasil pembangunan sudah cukup baik.

Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi pemuda dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Buluroto bisa diketahui dari proses perencanaan yaitu mengenai kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Buluroto dan tidak adanya wadah bagi pemuda, selanjutnya dalam proses pelaksanaan yaitu mengenai pelaksanaan program pembangunan diserahkan kepada pemborong, selanjutnya dalam proses pemantauan dan evaluasi yaitu mengenai tidak adanya ruang bagi pemuda untuk ikut memantau dan menyampaikan informasi mengenai permasalahan pelaksanaan pembangunan secara langsung, dan dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan yaitu mengenai kurangnya sosialisasi mengenai SPP dan adanya seleksi ketat dari pihak Pemerintah Desa bersama dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi pemuda dalam menyukseskan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buluroto Kabupaten Blora, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa memberikan alternatif untuk memecahkan masalah ataupun untuk mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Buluroto sebagai pihak yang menyelenggarakan forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menentukan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang mengutamakan prinsip partisipatif seharusnya bisa mengikutsertakan seluruh pemuda desa tanpa terkecuali dalam setiap tahapan atau proses pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hingga pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap aset pembangunan utamanya terhadap program pembangunan yang difasilitasi oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan dengan cara memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masing-masing dusun serta memberikan undangan tertulis kepada pemuda untuk hadir dalam forum Musrenbangdes.

2. Bagi Pemuda

Pemuda desa seharusnya bisa lebih aktif dan peduli untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang difasilitasi oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Pengelolaan Dana Bergulir melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

DAFTAR PUSTAKA

Ainun Rohman, dkk. 2012. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.

Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

R. Wrihatnolo, Randy dan Riant Nugroho. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.

Soebiato, Poerwoko dan Totok Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sj. Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Usman, Husnaini dan Setyadi Akbar, Purnomo. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Akasara.

Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan

INTERNET

(Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok, Yoni Yulianti,
<http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ANALISIS-PARTISIPASI-MASYARAKAT.pdf> diakses pada 7 November 2014 pukul 15.30 wib)
<http://eprints.uny.ac.id/8565/3/BAB%202-05504241003.pdf> diakses pada tanggal 10 November 2014 pukul 15.20 wib)
<http://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab%202%20-05101241004.pdf> Diakses pada 9 November 2014. Pada pukul 16.00 wib)
http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan. Diakses pada 8 November 2014 Pukul 13.50 wib)
<http://riset.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/MEMBANGUN-SUMBER-DAYA-MANUSIA-KAWASANPERBATASAN-Perspektif-Pemberdayaan-Pemuda-di-Provinsi-Kepulauan-Riau.pdf> diakses pada tanggal 16 November 2014 pukul 16.30 wib)
(PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PENGEMBANGAN%20ORGANISASI%20KEPEMUDAAN.pdf> kamis 19 pebruari 2015 pukul 22.10 wib)
(Skripsi Alfian Riza, Ebtaryadi, Hubungan Nilai Ujian Naional (NUN) SLTP dan Keterlibatan Dalam Organisasi Pemuda Dengan Prestasi Belajar Alat Ukur Kelas X SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta,
<http://eprints.uny.ac.id/8565/1/1-05504241003.pdf> diakses pada 10 November 2014 pukul 11.00 wib)

(UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan diakses pada 3 November 2012 Pukul 14.15 wib)

(UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diakses pada 3 November 2012 Pukul 14.15 wib)

(PP No 72 Tahun 2009 diakses pada 3 November 2012 Pukul 14.15 wib)